



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 050/DISDIKBUD/1557 tanggal 28 Desember 2022, Hal Permohonan Standar Harga Agar Dapat Diakomodir dalam Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Barang dan Jasa;
 - b. bahwa menindaklanjuti Telaahan Staf dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 426/DISPORAPAR/54 tanggal 10 Februari 2023, Hal Ajuan Standar Harga;
 - c. bahwa menindaklanjuti Telaahan Staf dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 420/Kesra/146 tanggal 13 Maret 2023, Hal Usulan Standar Satuan Harga (SSH) untuk Kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - d. bahwa menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 143.A/Sekrt-DPRD/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, Hal Usulan Perubahan Standar Harga 2023;
 - e. bahwa menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 000/DPMPSTP/UM/343 tanggal 16 Maret 2023;
 - f. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 000/DISPORAPAR/155 tanggal 14 April 2023;

g. bahwa ...

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...

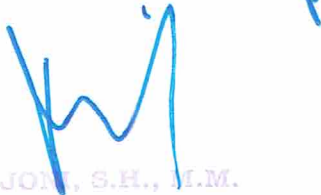
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

H. HENDRIZAL

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 12

a. Lampiran Standar Satuan Harga Barang dan Jasa

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00481	Amplop Coklat	Standar	Pack	38.900
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00389	Amplop Coklat	1/2 Folio	Pack	50.175
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00559	Amplop Coklat	Standar	Pes	528
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00565	Amplop Coklat	Standar	Pes	95.339
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00003	Amplop Coklat (@ 10)	309 Tali Kancing	pak	20.000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00002	Amplop Coklat (@ 10)	308 Tali Kancing	pak	15.200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00009	Amplop Coklat (@ 100)	Folio dengan Seal	pak	59.700
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00008	Amplop Coklat (@ 100)	Folio	pak	43.400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00007	Amplop Coklat (@ 100)	A4	pak	43.400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00006	Amplop Coklat (@ 100)	A3	pak	103.000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00011	Amplop Coklat (@ 100)	1/2 folio	pak	38.900
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00010	Amplop Coklat (@ 100)	B4 (uk Map)	pak	110.000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00004	Amplop Coklat (@ 50)	310 Tali Kancing	kotak	60.800
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00005	Amplop Coklat (@ 50)	312 Tali Kancing	pak	123.000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00438	Amplop Kertas Samson Ukuran 11 x 24 Cm	Standar	Pack	25.000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00561	Amplop Putih	Standar	Pcs	38.183
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00451	Amplop Putih Polos	Standar	Pack	25.400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00624	Amplop Putih polos	Standar	Pcs	331
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00313	Amplop Putih/Polos	Standar	pack	48.800
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00335	Amplop Putih/Polos	Standar	pack	39.600
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00015	Amplop Putih/Polos	Standar	pak	38.900
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00014	Amplop Putih/Polos	No. 104	Pak	29.300
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00013	Amplop Putih/Polos	No. 90	Pak	56.400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00012	Amplop Putih/Polos	No. 110	Pak	45.600
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00264	Alat pembaca E-KTP	DE-911	Unit	19.198.300
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00445	Alat Tulis Kantor	Penggaris	Buah	14.975
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.1.12.01.03.0001.00302	Album photo	Standar	Buah	116.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.02.16.01.0003	Alat Peraga Pelatihan dan Percetakan Lainnya	5.2.02.16.01.0003	Dekorasi Peralatan Khatt	Standar	Paket	7.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TRI JOJO I, S.H., M.M.

NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULLU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI